

Analisis Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang (Studi Kasus : Pembangunan Taman Kota di Semarang Tahun 2017)

Chauvina Sefdiany – 14010115120021

Chauvina10@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Edi Santosa, SU

Edisantosa05@yahoo.co.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

INTISARI

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah sebagai salah satu tindakan untuk mengurangi masalah yang ada disekitar seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan membuat kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan itu diimplementasikan melalui program Ruang Terbuka Hijau berupa pembangunan Taman Kota sebagai wujud dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dalam hal ini pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau pasal 93, 94, 95, dan pasal 96, agar pembangunan kota tetap terlaksana tanpa mengurangi lahan RTH. Perda tersebut mengacu pada Undang – Undang No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Dalam hal ini penulis akan lebih berfokus pada analisis kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* terhadap tingkat keberhasilan RTH Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwasannya kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* turut mempengaruhi tingkat keberhasilan RTH Kota Semarang sebesar 24,2%. Masih ditemui juga beberapa hambatan didalam implementasi dari program RTH Kota Semarang, yang menjadikan implementasi program tidak mencapai titik maksimal.

KATA KUNCI

Kebijakan Lingkungan, Partisipasi Stakeholders, Politik Lingkungan.

Pendahuluan

P eberadaan manusia dan lingkungan merupakan salah satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dimana saling bergantung satu sama lain. Manusia yang membutuhkan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya, dan lingkungan yang perlu campur tangan manusia untuk melestarikan dan menjaga. Namun sekarang ini kondisi lingkungan sudah sangat memprihatinkan dikarenakan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga merusak kelangsungan lingkungan. Kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan dan semakin banyaknya kasus terkait bencana alam karena ulah manusia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan terkait lingkungan.

Faktor pendorong Pemerintah dalam membuat kebijakan tidak lain karena sebagai salah satu tindakan kolektif guna mengurangi masalah yang terdapat di masyarakat. Kehadiran kebijakan di tengah kehidupan dari pembuatan keputusan itu berdampak secara langsung terhadap kehidupan kelompok, individu dan masyarakat. Maka dari itu, dibeberapa tingkatan dalam proses tersebut akan banyak pula orang yang akan terlibat di dalamnya. Seperti halnya kebijakan lingkungan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut bertujuan supaya masyarakat mampu menjaga kelestarian lingkungan agar dalam proses pembangunan ini tetap bersandar pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable city*). Disisi lain sebagai upaya untuk mengurangi angka kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia. Dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan tersebut pemerintah juga melibatkan LSM, masyarakat, tokoh masyarakat, swasta, dll.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan maka membuat sebuah kebijakan lingkungan. Dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan yang ada di Kota Semarang, serta melibatkan berbagai pihak seperti swasta, LSM, dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Selain itu permasalahan tersebut juga merupakan PR bagi Pemerintah Kota Semarang yang dituntut untuk membawa Kota Semarang menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi ekonomi, teknologi, transportasi, maupun menciptakan kota yang nyaman bagi masyarakat Kota Semarang.

Kebijakan lingkungan itu di dorong dengan adanya program Ruang Terbuka Hijau berupa pembangunan Taman Kota sebagai wujud pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota Semarang pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan tiap tahunnya, kepadatan penduduk mengakibatkan kawasan lahan terbuka hijau dapat berkurang dan pembangunan yang tidak terkendali. Berkaitan hal ini pemerintah Kota Semarang mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau agar pembangunan kota dapat terlaksana tanpa mengurangi lahan RTH. Kawasan RTH yang sudah menjadi bangunan masih harus diperhatikan kualitas vegetasinya, supaya kualitas RTH di kawasan permukiman dapat dimanfaatkan serta dinikmati masyarakat.

Walikota Kota Semarang Hendrar Prihardi memang sudah memasukkan program pembangunan Ruang Terbuka Hijau didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menjadi implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kota Semarang tahun 2016 – 2021. Serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 bahwasannya proporsi Ruang Terbuka Hijau wilayah kota paling sedikit adalah 30% dari luas wilayah kota, dan Ruang Terbuka Hijau Publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Hal tersebut telah tertulis didalam peraturan daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pasal 93, 94, 95, dan pasal 96.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdapat di perkotaan yang ideal adalah adanya keseimbangan penggunaan tata ruang yang memadai dengan luas perkotaan dan penambahan penduduk. Konsep rencana tata ruang terbuka hijau perkotaan, terdapat dua fungsi yaitu utama (intrinsik) dan tambahan (ektrinsik). Fungsi utama (intrinsik) yakni sebagai fungsi ekologis, sedangkan untuk tambahan (ektrinsik) adalah fungsi ekonomi, arsitektural, dan sosial. Fungsi itu harus dapat dikombinasikan sesuai kepentingan, kebutuhan dan keberlanjutan kota. RTH berfungsi

ekologis berguna menjamin keberlanjutan dari suatu kawasan kota secara fisik, dalam bentuk rencana berukuran, berlokasi, dan berbentuk pasti dalam suatu kota. Fungsi tambahannya adalah untuk mendukung serta menambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota. Maka dari itu dapat berlokasi sesuai kebutuhan dan juga kepentingannya, misalnya rekreasi (lapangan olahraga), keindahan (taman), dan pendukung lanskap kota.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Semarang perlu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan program pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Pemerintah memerlukan bantuan berupa tambahan investasi dari pihak swasta. Pemerintah tidak mampu menjalankan sendiri, mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki yakni keterbatasan anggaran ataupun keterbatasan sumber daya yang lain. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga perlu menjalin kemitraan atau kerjasama dengan masyarakat sebagai pengguna Ruang Terbuka Hijau.

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan *stakeholder* bukan hanya sekedar formalitas saja namun memang sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Implementasi dari kebijakan lingkungan juga harus sesuai dengan rencana, serta dari UU maupun Perda terkait. Pemerintah Kota Semarang masih perlu memastikan bahwasannya tujuan dari kebijakan lingkungan berupa program RTH dalam bentuk pembangunan taman kota dapat tercapai. Apabila dalam realisasi implementasi kebijakan lingkungan masih belum maksimal maka Pemerintah perlu melakukan evaluasi sehingga dapat mengetahui faktor penghambat dari belum tercapainya tujuan dari program RTH berupa taman kota.

Dalam hal ini peneliti akan lebih berfokus pada analisis kebijakan lingkungan yang ada di Kota Semarang. Menurut Dunn, analisis kebijakan merupakan kegiatan intelektual dan secara praktis yang bertujuan untuk secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang proses kebijakan. Dapat dipahami bahwa dalam prosesnya kebijakan masih banyak diwarnai “kepentingan publik terbatas” dari pada masyarakat secara luas. Satu hal yang mudah ditemui yaitu, dalam pembuatan kebijakan tidak banyak melibatkan analisis kebijakan dan tentu saja proses analisis kebijakan. Sehingga dapat dikatakan pula bahwasannya kebijakan masih sering dipengaruhi oleh kepentingan baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dan seringkali implementasi dari program yang dibuat pemerintah belum terealisasi dengan baik dan maksimal. Sehingga patut disayangkan apabila program yang sudah dibuat cukup bagus dan mempunyai tujuan yang mampu membawa dampak positif bagi seluruh kalangan, namun tujuan tersebut belum tercapai dikarenakan beberapa faktor penghambat.

Kebijakan yang tidak mampu diimplementasikan secara maksimal dapat diartikan bahwa suatu kebijakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana awal, kemungkinan dikarenakan beberapa pihak yang terlibat di dalam realisasi tidak dapat bekerjasama dengan baik atau bekerja namun tidak efisien, maupun bekerja namun tidak sepenuhnya menguasai permasalahan atau memahami apa yang sudah ditugaskan. Sehingga seberapa besar apapun usaha mereka serta diikuti dengan hambatan – hambatan yang tidak mampu terselesaikan mengakibatkan realisasi dari implementasi kebijakan lingkungan sukar untuk dapat mencapai tujuannya.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui efektivitas dari implementasi Perda RTH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang sejauhmana tingkat keberhasilan dari implementasi Perda RTH melalui analisis kebijakan yang telah ditetapkan. Serta untuk mengidentifikasi apakah tingkat partisipasi dari adanya *stakeholders* cukup mempengaruhi keberhasilan dari program RTH yang ada, sehingga mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan lingkungan berupa program pembangunan Taman Kota tahun 2017.

Sebagai sebuah kajian ilmiah dan sesuai dengan prinsip penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa implementasi Perda Kota Semarang No.7 Tahun 2010 dalam perspektif politik lingkungan.
2. Untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi *stakeholders* terhadap program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang dilihat dari perspektif politik lingkungan.
3. Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program RTH.

Teori Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D, partisipasi yakni keterlibatan seseorang atau beberapa orang didalam kegiatan tertentu. Keterlibatan tersebut dapat berupa keterlibatan emosi, mental serta fisik dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan serta mendukung tujuan dan tanggung jawab akan segala keterlibatan.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, partisipasi juga dapat di pahami sebagai bentuk penyampaian saran dan pendapat, keterampilan, bahan, barang, dan jasa. H.A.R Tilaar menyebutkan bahwa partisipasi adalah keinginan guna mengembangkan demokrasi melalui desentralisasi, diperlukan adanya perencanaan dari bawah dengan melibatkan masyarakat kedalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian partisipasi diatas, dapat disimpulkan partisipasi merupakan suatu keterlibatan secara aktif dari seseorang atau sekelompok orang untuk turut berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan mulai terlibat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga tahap evaluasi.

Conyers mengemukakan pentingnya partisipasi yaitu: pertama, partisipasi dari masyarakat merupakan alat yang berguna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, sikap masyarakat setempat dan kebutuhan, dimana tanpa partisipasinya program pembangunan dapat gagal, kedua, masyarakat akan lebih percaya jika program pembangunan turut melibatkan masyarakat dari mulai proses persiapan dan perencanaannya, dikarenakan mereka akan lebih mengetahui dan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program tersebut, ketiga, termasuk hak demokrasi apabila masyarakat turut dilibatkan dalam pembangunan.

Kegiatan partisipasi mampu meingkatkan kemampuan setiap orang atau individu baik yang terlibat secara langsung atayupun yang tidak langsung didalam program pembangunan dengan melibatkan diri mereka kedalam pengambilan keputusan serta kegiatan – kegiatan dalam jangka waktu panjang.

Bentuk – Bentuk Partisipasi

Beberapa bentuk partisipasi yang diberikan kepada masyarakat didalam program pembangunan, yakni partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi uang, partisipasi buah pikiran, partisipasi keterampilan, partisipasi sosial, maupun partisipasi didalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Berdasarkan beberapa bentuk partisipasi diatas, maka partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu bentuk partisipasi nyata dan bentuk partisipasi dalam bentuk tidak nyata. Bentuk partisipasi nyata seperti harta benda, tenaga, uang, dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi tidak nyata seperti partisipasi sosial, partisipasi representatif, partisipasi buah pikiran, dan partisipasi pengambilan keputusan.

Partisipasi harta benda merupakan partisipasi yang menyumbang harta benda, biasanya berupa alat – alat kerja ataupun perkakas. Partisipasi uang merupakan bentuk partisipasi yang berguna guna memperlancar usaha untuk mencapai kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi keterampilan merupakan partisipasi dalam bentuk memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimiliki kepada anggota lain yang turut membutuhkannya. Sedangkan partisipasi tenaga merupakan partisipasi dalam bentuk memberikan tenaga guna melaksanakan usaha yang dapat menunjang keberhasilan program.

Partisipasi buah pikiran adalah bentuk wujud partisipasi berupa sumbangan ide, buah pikiran konstruktif atau pendapat, untuk menyusun program ataupun memperlancar implementasi program. Sedangkan partisipasi sosial adalah bentuk partisipasi yang diberikan oleh partisipan. Misal seperti menghadiri kematian, arisan, dan juga sumbangan perhatian maupun sebagai tand a kedekatan guna memotivasi orang lain untuk turut berpartisipasi.

Berdasarkan penjelasan mengenai partisipasi dapat dipahami bahwa Pemerintah tidak mampu bekerja sendirian, perlu adanya bantuan dari pihak – pihak lain yang turut membantu dalam mewujudkan program tersebut. Kontribusi dari pihak luar biasanya disebut dengan *stakeholder* , dimana sekelompok orang yang turut mempengaruhi serta membantu pemerintah dengan mempunyai tujuan yang sama.

Teori Stakeholder

Pengertian *stakeholders* menurut Freeman dan McVea ialah kelompok atau individu yang mampu memengaruhi maupun dipengaruhi oleh tujuan dari organisasi. Freeman menjelaskan *stakeholders* sebagai seseorang yang memiliki kepentingan atau perhatian tertentu pada suatu permasalahan. Sedangkan Grimble and Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.

Teori *stakeholder* ialah teori yang memperlihatkan pihak mana saja perusahaan atau pemerintah bertanggungjawab. Hadirnya teori *stakeholders* mampu menguatkan konsep bahwasannya perusahaan ataupun pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik saham atau masyarakat namun juga pada para pemangku kepentingan.

Teori *stakeholders* merupakan suatu sistem yang berbasis pada pandangan tentang organisasi beserta lingkungannya, dimana terdapat sifat saling mempengaruhi antara keduanya secara kompleks dan dinamis. *Stakeholders* dan organisasi saling mempengaruhi, ini dapat dilihat dari hubungan yang terjadi diantara keduanya yang berbentuk akuntabilitas dan responibilitas. Oleh karena itu organisasi tentu saja memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholders*nya.

Hal yang paling mendasar dari teori *stakeholders* ialah semakin kuat hubungan antara pihak yang terlibat, maka akan semakin baik pula bisnis atau program yang diwujudkan. Sebaliknya, apabila hubungan yang terjalin buruk maka akan buruk pula dampak dari kerjasama tersebut. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, dimana tujuannya ialah guna membantu perusahaan atau pemerintah dalam memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal serta turut mengembangkan keunggulan yang kompetitif.

Dalam mengembangkan teori *stakeholders*, Freeman dalam Susanto dan Tarigan memperkenalkan konsep *stakeholder* dalam dua model yaitu:

1. Model kebijakan dan perencanaan bisnis

Model ini berfokus dalam mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan dari perusahaan atau pemerintah dengan beberapa kelompok yang dukungannya diperlukan dalam kelangsungan usaha perusahaan atau pemerintahan. Dapat dikatakan bahwasannya model ini lebih berfokus pada bagaimana cara yang digunakan oleh perusahaan atau pemerintah dalam mengelola hubungan dengan *stakeholders*nya.

2. Model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*

Pada mode kedua yang menjadi fokus adalah perencanaan perusahaan atau pemerintah dengan analisis yang diperluas dengan turut memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin saja berlawanan bagi perusahaan atau pemerintah. Kelompok yang berlawanan ini termasuk dalam badan regulator ataupun pemangku kepentingan yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan sosial.

Terlepas dari itu *stakeholders* terbagi menjadi 3 kelompok yaitu: *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci, dan *stakeholders* sekunder. Yang dimaksud dengan *stakeholders* primer yaitu *stakeholders* yang mempunyai dampak secara langsung baik negatif maupun positif dari adanya suatu rencana dan mempunyai kepentingan secara langsung dari kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi *stakeholders* primer yaitu Pemerintah Kota Semarang.

Dan yang dimaksud dengan *stakeholders* kunci yakni pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam proses pengambilan keputusan, serta yang mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan taman kota di Kota Semarang yaitu BAPPEDA dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan *stakeholders* sekunder merupakan *stakeholders* pendukung dan tidak memiliki kepentingan secara langsung akan suatu rencana, namun mempunyai kepedulian yang cukup besar dalam proses pembangunan. Akan tetapi *stakeholders* sekunder menjadi pendukung dalam fasilitator pembangunan, seperti LSM, pihak swasta, maupun peneliti.

Teori Evaluasi

Evaluasi lebih sering digunakan untuk mengetahui atau menilai sejauhmana keefektivan dari kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan pada konstituennya. Melihat sejauh mana tujuan yang telah dicapai, serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno, evaluasi kebijakan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan

mengenai estimasi atau penilaian kebijakan terkait substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Lester dan Stewart bahwa evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua tugas yang berbeda, yakni tugas pertama ialah untuk menentukan konsekuensi – konsekuensi yang dihasilkan dari suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua ialah untuk menilai kegagalan atau keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilihat berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang pengukurannya serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakan maupun dari segi hasilnya atau dampak dari terealisasinya kebijakan atau program tertentu, sehingga dapat menentukan langkah yang akan diambil pada masa mendatang.

Implementasi kebijakan menurut Grindle adalah bukan sekedar mekanisme dari hasil keputusan politik melalui birokrasi, melainkan lebih dari sekedar itu, yakni terkait masalah konflik, keputusan serta siapa saja yang memperoleh dampak dari suatu kebijakan. Maka tidak salah apabila implementasi kebijakan dapat dikatakan menjadi aspek yang penting didalam proses kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengevaluasi Perda RTH dengan melihat sisi implementasinya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap proses keberhasilan program RTH di Kota Semarang.

Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan memiliki beberapa dimensi yang harus diperhatikan ketika membicarakan evaluasi. Menurut Winarno setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas didalam memperhitungkan dampak yang dihasilkan dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
- b) Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
- c) Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang
- d) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
- e) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Menurut Soeprapto, bahwa isu kritis dalam mengevaluasi dampak kebijakan ialah apakah program tertentu telah mampu memberikan dampak yang lebih atau tidak, dapat terjadi secara alami meskipun tanpa adanya intervensi atau dibandingkan dengan intervensi alternatif. Tujuan pokok dari penilaian dampak yaitu untuk mengetahui efek – efek yang menguntungkan atau hasil yang menguntungkan dari suatu intervensi.

Rossi dan Freeman mendefinisikan penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intrvensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas guna menjawab pertanyaan terkait apakah kebijakan mampu dijalankan dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, besar biaya yang dikeluarkan, serta keuntungan yang didapat, dan siapa yang turut menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah berjalan. Selain itu evaluasi kebijakan juga bertujuan untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah dapat dikatakan berhasil atau tidak, dengan melihat implementasi dari kebijakan tersebut.

Konsep Keberhasilan

Keberhasilan yaitu merupakan pencapaian terhadap suatu keinginan yang sudah dibuat dan diinginkan maupun kemampuan untuk melewati serta meminimalisir dari faktor – faktor kegagalan. Menurut Goerge C. Edward III. Edward III keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan tingkat pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi dapat efektif apabila para pembuat keputusan mengetahui tentang apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan mengenai apa yang akan mereka kerjakan dapat terjadi apabila komunikasi dapat terjalin dengan baik, kebijakan juga harus dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten.

2. Sumberdaya

Sumberdaya mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan, dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud yaitu implementor, informasi serta wewenang.

3. Disposisi

Hal – hal yang termasuk dalam disposisi ini mengenai sikap pelaksana yang harus mempunyai dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang bersifat kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan maka dapat menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian deskriptif. Pada desain ini menggunakan pendekatan gabungan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif (*mix methods*).

Pembahasan (ditulis langsung dengan judul sub-bab spesifik)

Tingkat keberhasilan program Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang dalam implementasinya turut dipengaruhi dengan adanya kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* yang saling berkesinambungan. Sejalan dengan tipe evaluasi kebijakan sistematis, bahwasannya kebijakan akan dilihat secara obyektif berdasarkan program kebijakan yang telah direalisasikan guna mengukur dampak bagi masyarakat dan melihat apa saja tujuan yang telah dicapai.

Membahas evaluasi kebijakan lebih lanjut, sebenarnya terdapat beberapa dimensi evaluasi kebijakan dimana hal tersebut untuk melihat dampak dari kebijakan. Berikut adalah dimensi – dimensi evaluasi kebijakan :

1. Dampak kebijakan pada masalah publik dan orang – orang yang terlibat

Keberadaan pembangunan taman kota memang tidak semata – mata hanya untuk memberikan ruang publik bagi masyarakat namun juga sebagai salah satu wujud usaha Pemerintah untuk mengurangi permasalahan seperti banjir dan juga sampah. Dapat ditinjau bahwasannya setelah adanya taman kota Pemerintah lebih memperhatikan kondisi lingkungan di Kota Semarang, kualitas lingkungan di Kota Semarang mulai membaik. Masalah banjirpun sudah mulai minim terjadi dan tidak separah beberapa tahun lalu.

Dampak kebijakan bagi orang – orang yang terlibat tentu saja sangat berpengaruh positif, apabila implementasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya akan memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi orang – orang yang terlibat. Karena hasil kerja mereka dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Semarang, dan membuat Kota Semarang mendapat beberapa penghargaan.

2. Dampak kebijakan pada keadaan atau kelompok diluar sasaran kebijakan.

Keberadaan taman kota tentu saja juga akan mendapat apresiasi dari pihak luar karena meskipun notabene sebagai Ibukota Provinsi pembangunan juga masih memperhatikan dari aspek lingkungan yang artinya Pemerintah berusaha memperbaiki tataruang kota yang dampaknya tidak hanya baik untuk sekarang namun juga masa akan datang.

3. Dampak kebijakan untuk saat sekarang dan mendatang

Implementasi Ruang Terbuka Hijau dengan pengadaan pembangunan taman kota sekarang ini dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Ketersediaan lahan hijau menjadikan kondisi lingkungan tampak hijau, sejuk, rindang, ketersediaan lahan resapan air, serta dari segi estetika juga menambah cantik tataruang kota.

Pemerintah Kota Semarang sudah merencanakan beberapa program terkait Ruang Terbuka Hijau, hal tersebut dilakukan supaya lahan RTH Kota Semarang dapat mencapai 30% dari luas wilayah kota. Keberadaan lahan hijau sangat dibutuhkan di wilayah perkotaan, pada masa mendatang beberapa program RTH sangat akan dirasakan dampaknya. Jika Pemerintah tidak mempunyai kesadaran terhadap lingkungan sejak saat ini, maka dapat dipastikan kualitas lingkungan akan buruk dan lahan hijau akan sulit ditemukan pada masa mendatang.

4. Biaya langsung yang dikeluarkan guna membiayai program kebijakan publik

Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang guna merealisasikan program pembangunan taman kota pada tahun 2017 berkisar 37,6 Milyar yang dibagi kepada 16 kecamatan. Biaya tersebut didapat berdasarkan anggaran APBD tahun 2017, meskipun program tersebut termasuk dalam program prioritas namun Pemerintah Kota Semarang merealisasikannya secara bertahap.

5. Biaya tidak langsung yang dibebankan kepada masyarakat atau beberapa masyarakat dari kebijakan publik

Pembangunan taman kota tahun 2017 yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Semarang sebagai salah satu wadah untuk bersosialisasi dibuka secara gratis tanpa memungut biaya. Keberadaan taman kota tersebut memang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang dengan permainan anak, wifi area, tempat charger handphone, lampu hias, dll. Hal tersebut mendapat respon baik dari masyarakat, karena masyarakat sekarang ini banyak yang mengunjungi taman kota sekedar untuk berolah raga, refreshing ataupun menggunakan fasilitas wifi.

Hasil dari kebijakan tersebut berupa Perda Ruang Terbuka Hijau. Perda Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang menjadi acuan OPD dalam melaksanakan program pembangunan taman kota tahun 2017, untuk menyesuaikan langkah apa saja yang harus dilakukan selama merealisasikan program. Perda Ruang Terbuka Hijau juga sebagai pengingat mengenai hal – hal yang tidak boleh dilakukan OPD sehingga tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan OPD untuk mengikuti ketentuan yang ada pada Perda akan turut mempengaruhi tingkat keberhasilan program. Dapat ditarik sebuah pemahaman bahwasannya sebaik apapun muatan Perda jikalau implementasinya tidak menyesuaikan atau tidak berorientasi Perda maka hasil yang dicapai dari implementasi program tidak akan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya muatan yang ada dalam kebijakan lingkungan Kota Semarang sudah sesuai dengan perspektif politik lingkungan, hasil evaluasi terkait implementasi kebijakan telah menunjukkan bahwasannya dampak yang dihasilkan dari kebijakan mampu membawa pengaruh positif pada beberapa aspek, hasil dari kebijakan lingkungan telah dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang, serta tujuan dari kebijakan lingkungan dapat dikatakan cukup berhasil. Peneliti mengatakan cukup berhasil dikarenakan didalam implementasi masih terdapat beberapa hambatan sehingga belum mencapai target awal yang telah ditentukan.

Tindak partisipasi yang dilakukan oleh *stakeholders* menunjukkan bahwa adanya dukungan yang mereka berikan guna turut mensukseskan program RTH. *Stakeholders* yang terlibat didalam program RTH ini juga terdiri dari beberapa pihak yang saling bekerjasama dengan melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh dan mempunyai satu tujuan yang sama. Tingkat partisipasi *stakeholders* terhadap program RTH di Kota Semarang dilihat dari perspektif politik lingkungan bahwasannya *stakeholders* yang terlibat mempunyai tujuan yang sama yakni menjadikan Kota Semarang lebih baik dari segi lingkungan baik untuk masa sekarang ataupun mendatang. Hal itu dapat dilihat berdasarkan pencapaian yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang hingga saat ini, dan segala usaha yang belum berhenti untuk mewujudkan keinginan Pemerintah Kota Semarang untuk mencapai luasan wilayah RTH sebesar 30% dari luas wilayah kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DISPERKIM selaku pelaksana dari program RTH pembangunan taman Kota Semarang dapat diketahui jika terciptanya suatu pembangunan yang hebat diperlukan adanya partisipasi serta kerjasama antar *stakeholders*. Guna mewujudkan suatu pembangunan yang mampu berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota

Semarang tidak bisa bekerja sendiri – sendiri dan tanpa didukung dengan adanya suatu kebijakan yang sah sebagai acuan pelaksanaan.

Keberhasilan implementasi program RTH tidak lepas juga dari adanya pengaruh dari kebijakan lingkungan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang, peraturan daerah yang terkait program RTH yaitu Perda Kota Semarang No.7 Tahun 2010 pasal 93, 94, 95, serta 96. Peneliti telah membuat tabel untuk mengetahui apakah muatan dari perda telah sesuai dengan perspektif politik lingkungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pengaruh kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* terhadap tingkat keberhasilan program, peneliti berusaha melakukan wawancara mendalam yang dilakukan dengan pihak DPRD Komisi C Kota Semarang, BAPPEDA Kota Semarang, dan juga DISPERKIM Kota Semarang. Berikut hasil kutipan wawancara dengan pihak terkait :

“tentu saja, karena adanya satu tujuan yang sama antara Eksekutif, Legislatif, maupun masyarakat maka akan sangat mempengaruhi keberhasilan program ruang terbuka hijau, adanya hubungan yang baik antara *stakeholders*, serta seluruh pihak bekerjasama dengan melaksanakan tugasnya masing – masing. Dalam implementasi program tersebut juga tetap memperhatikan kebijakan lingkungan yang ada, sehingga semuanya sejalan.”

Hasil kutipan wawancara tersebut membuktikan bahwa keberhasilan program ditunjang oleh seluruh kerjasama antar *stakeholders*, hubungan yang baik antara *stakeholders* hingga pelaksanaan tugas masing – masing *stakeholders* yang dilakukan dengan sungguh – sungguh.

“ya saling mempengaruhi, dimana kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* bekerja dengan perannya masing – masing, karena kebijakan yang menjadi acuan untuk diikuti dalam *stakeholders* bertindak nantinya.”

Pernyataan tersebut tidak hanya dikeluarkan dari pihak DPRD namun BAPPEDA turut menyatakan pernyataan yang serupa, yakni meyakini bahwasannya kebijakan merupakan acuan *stakeholders* untuk bertindak dalam menjalankan tugasnya, supaya tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

“seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, memang diperlukan adanya partisipasi dan kerjasama yang kuat untuk menciptakan suatu pembangunan yang hebat. Seperti tagline kota semarang kan BERGERAK BERSAMA untuk SEMARANG HEBAT.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DISPERKIM selaku pelaksana dari program RTH pembangunan taman Kota Semarang dapat diketahui jika terciptanya suatu pembangunan yang hebat diperlukan adanya partisipasi serta kerjasama antar *stakeholders*. Guna mewujudkan suatu pembangunan yang mampu berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kota Semarang tidak bisa bekerja sendiri – sendiri dan tanpa didukung dengan adanya suatu kebijakan yang sah sebagai acuan pelaksanaan.

Analisis Kuantitatif

Hipotesis yang digunakan oleh peneliti yaitu dimana H_0 jika koefisien tidak berpengaruh signifikan, H_1 jika koefisien berpengaruh signifikan. Maka tolak H_0 jika $\text{sig} < \alpha$. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya sig. dari analisis kebijakan lingkungan adalah sebesar 0,019. Hasil pengujian tersebut menghasilkan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Karena $H_0 \text{ sig} < \alpha$, maka hipotesis pertama ditolak, sehingga hipotesis kedua dapat diterima yaitu analisis kebijakan lingkungan berpengaruh pada tingkat keberhasilan program RTH.

Hasil uji instrumen menjawab rumusan masalah terkait tingkat partisipasi *stakeholders* terhadap tingkat keberhasilan program RTH di Kota Semarang, uji t (parsial) hasil dari partisipasi *stakeholders* signifikansinya $0,009 < 0,05$, maka partisipasi *stakeholders* turut mempengaruhi tingkat keberhasilan RTH. Dasar dari teori *stakeholders* itu sendiri menjelaskan semakin baik hubungan kerjasama antar pihak, maka akan semakin baik pula hasil dari kerjasama tersebut. Tanpa adanya partisipasi *stakeholders* didalam program RTH maka program RTH tidak mungkin terlaksana, karena partisipasi *stakeholders* terbagi dalam beberapa bentuk partisipasi yakni partisipasi keterampilan, partisipasi tenaga, partisipasi pengambilan keputusan, partisipasi buah pikiran, dll.

Diketahui hasil dari uji determinasi nilai r square menghasilkan 0,242 yang artinya Tingkat Keberhasilan Program RTH dipengaruhi oleh Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders sebesar 24,2% sedangkan sisanya 75,8 dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel.

Nilai koefisien korelasi adalah $R = 0,491$. Artinya terdapat hubungan yang cukup erat antara Kebijakan Lingkungan, Partisipasi Stakeholders dan Tingkat Keberhasilan Program RTH. Hal ini dikarenakan nilai $R = 0,491$ merupakan nilai yang cukup besar. Korelasi yang terjadi adalah positif karena nilai R positif. Maka dari tabel 3.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH adalah Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi *Stakeholders*.

Analisis Mix Methods

Kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* bersama – sama mempengaruhi tingkat keberhasilan program RTH di Kota Semarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan lingkungan yang pro rakyat, implementasi program RTH yang mampu berdampak positif sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dampak tersebut mampu membawa pengaruh untuk masa kini ataupun masa mendatang. Tak dipungkiri bahwasannya didalam implementasinya masih terdapat beberapa hambatan sehingga menjadikan pencapaian tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada staff BAPPEDA Kota Semarang dan staff DISPERKIM Kota Semarang sebagai responden, dan diperoleh hasil bahwa Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders secara bersama – sama mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 3.11, diketahui hasil dari uji determinasi nilai r square menghasilkan 0,242 yang artinya Tingkat Keberhasilan Program RTH dipengaruhi oleh Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders sebesar 24,2% sedangkan sisanya 75,8 dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel.

Nilai koefisien korelasi adalah $R = 0,491$. Artinya terdapat hubungan yang cukup erat antara Kebijakan Lingkungan, Partisipasi Stakeholders dan Tingkat Keberhasilan Program RTH. Hal ini dikarenakan nilai $R = 0,491$ merupakan nilai yang cukup besar. Korelasi yang terjadi adalah positif karena nilai R positif. Maka dari tabel 3.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH adalah Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi *Stakeholders*.

Berdasarkan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif guna untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi *Stakeholders* secara signifikan mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Program RTH dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi *Stakeholders* secara signifikan mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang. Hal itu dibuktikan dengan kutipan wawancara dengan Pemerintah Kota Semarang yang dibuktikan dengan hasil uji determinasi. Terkait hambatan realisasi program RTH diharapkan Pemerintah Kota Semarang mampu segera menemukan solusi sehingga dapat meminimalisir hambatan yang terjadi.

Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebuah kesimpulan yakni implementasi Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu faktor pendukung dari tingkat keberhasilan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang yang dilihat berdasarkan perspektif politik lingkungan. Kesimpulan ini didapat berdasarkan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat dampak positif dari kebijakan terhadap beberapa dimensi, muatan dari kebijakan, serta implementasinya. Kesenambungan antara penggunaan perda didalam implementasi program merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Didalam implementasi program pembangunan taman kota tahun 2017 terdapat hambatan, sehingga jumlah taman kota pada saat itu tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Tingkat partisipasi *stakeholders* turut mempengaruhi tingkat keberhasilan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. Hal ini dibuktikan berdasarkan analisis kuantitatif uji t (parsial) yang signifikansinya $0,009 < 0,05$, yang berarti bahwa partisipasi *stakeholders* secara signifikan mempengaruhi tingkat keberhasilan Program Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* bersama – sama mempengaruhi tingkat keberhasilan program RTH di Kota Semarang. Kesimpulan ini dibuktikan berdasarkan pernyataan dari pihak Pemerintah yang disinkronkan dengan uji determinasi nilai r^2 menghasilkan 0,242, artinya tingkat keberhasilan program RTH dipengaruhi oleh kebijakan lingkungan dan partisipasi *stakeholders* sebesar 24,2% sedangkan sisanya 75,8 dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel.

Implementasi program pembangunan taman kota tahun 2017 mampu berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, namun informasi mengenai perkembangan pembangunan taman kota sangat minim sehingga masyarakat dan beberapa pihak yang tidak terlibat secara langsung didalam program tersebut akan sulit mengetahui sejauhmana progress yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Implementasi program pembangunan taman kota perlu diadakan evaluasi supaya hambatan yang terjadi dapat diminimalisir dan target dari program pembangunan taman kota dapat tercapai secara maksimal. Hasil evaluasi juga diharapkan diunggah di website resmi Pemerintah Kota Semarang, supaya menjadi koreksi bersama. Serta memastikan kembali bahwasannya didalam implementasi program benar-benar telah mengikuti perda yang berlaku.

2. Partisipasi *stakeholders* perlu ditingkatkan kembali, mengingat bahwasannya tingkat partisipasi *stakeholders* juga mempengaruhi tingkat keberhasilan program RTH. Didalam hal ini partisipasi dari pihak masyarakat dan LSM perlu mendapat ruang untuk terlibat terlebih didalam program tersebut. Semakin tinggi partisipasi *stakeholders* yang terlibat maka akan berdampak baik bagi keberhasilan program RTH.

3. Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu menghasilkan dan meningkatkan kualitas kebijakan yang pro rakyat tanpa menguntungkan pihak tertentu sehingga dampak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, serta mengajak seluruh aktor untuk terlibat aktif dalam mensukseskan program pembangunan taman kota. Faktor lain yang turut berpengaruh pada tingkat keberhasilan program RTH perlu dilakukan penelitian lanjutan, supaya menjadi informasi sekaligus saran bagi Pemerintah Kota Semarang.

4. Pemerintah Kota Semarang diharapkan mampu memberikan informasi terkait perkembangan program pembangunan taman kota di website resmi Pemerintah Kota Semarang, sehingga masyarakat dapat secara mudah untuk mengakses perkembangan program yang telah dicapai oleh Pemerintah.

5. Pemerintah Kota Semarang diharapkan rutin melakukan pengecekan terkait kondisi taman kota yang telah dibangun, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tanaman yang rusak atau layu, ataupun fasilitas taman yang sudah mulai rusak, serta rutin melakukan penyiraman taman kota minimal 2minggu satu kali.

6. Perlu adanya himbauan ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan taman kota yang bermuat lokasi serta fasilitas yang tersedia di setiap taman kota, dan larangan yang tidak boleh dilakukan di area taman kota disertakan dengan perda.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat selaku yang mewakili masyarakat didalam proses pembuatan kebijakan bisa lebih aktif didalam mendapatkan informasi terkait program RTH, serta turut aktif didalam mengevaluasi Pemerintah didalam melaksanakan program RTH.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak – pihak yang telah menjadi narasumber dan responden didalam penelitian ini. Serta Pak Edi Susanto selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Agus, Erwan dan Dyah Ratih.2007. Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.Yogyakarta.
- Brannen, Julia. 2004. Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiharjo, Eko. 2009. Kota Berkelanjutan (Sustainable City). PT.Alumni. Bandung.
- Busyra Azhari.2012. Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Rajawali Pers. Jakarta.
- Creswell John.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada Universty Press. Yogyakarta.
- Ghozali,Imam.2013.Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS.Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang.
- Hidayat, Herman. 2011.Politik Lingkungan: Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi.Yayasan Pustaka Obor Indonesia.Jakarta.
- Keraf, Sonny. 2010.Etika Lingkungan Hidup .Kompas.Jakarta.
- Marzully, Nur dan Denies Priantinah.2012.Vol I.Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Nominal.
- Nazarudin. 1994. Penghijauan Kota. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nurhayati,Arifin dan Arifin Susilo Hadi.2002. Taman dalam Ruang. Swadaya.Jakarta.
- Soeprapto.2000. Evaluasi Kebijakan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik .Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono.2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Totok, Mardikanto. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2015. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winarno,Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Media Presindo. Yogyakarta.
- Zulkifli, Aris. 2015. Pengelolaan Kota Berkelanjutan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Undang-Undang Penataan Ruang No 26 Tahun 2007 pasal 29.
- Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau .

Daftar Narasumber

Kadarlusman, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Semarang, 1 Februari 2019, pukul 09.00 WIB.

Wachid N, Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, 4 Februari 2019, pukul 10.00 WIB.
Ismet, Kasubid Perencanaan Penataan Ruang, Pertahanan dan Lingkungan Hidup BAPPEDA Kota Semarang, 23 Januari 2019, pukul 08.00 WIB.
Safrinal, Kasubid Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Semarang, 25 Januari 2019, pukul 10.00 WIB.
Agung, Kasubag Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 21 Januari 2019, pukul 11.00 WIB.
Widi N, Direktur LSM Pattiro Kota Semarang, 7 Februari 2019, pukul 08.00 WIB.

Tentang Penulis

Chauvina Sefdiary adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar tema kebijakan lingkungan, partisipasi stakeholders, program RTH.